



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024



**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


* AKHMAD FARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK PD dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2022) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Permendagri 86/2017 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD); dengan menyajikan tabel T-C.31 Permendagri 86/2017 sebagai berikut

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja PD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja PD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum PD, usulan DAPAT dan usulan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD (misal Disdukcapil tentang SIAK, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pencapaian IKU Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja PD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR	BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd.
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR	BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd.
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
				PEMBANGUNAN DAERAH	
8	DINAS TENAGA KERJA	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN	DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM	EKA YULIANTO SE, ME
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM	EKA YULIANTO SE, ME
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR	BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd.
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN	DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling
15	DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM	EKA YULIANTO SE, ME

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN	DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
18	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
19	SEEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
23	INSPEKTORAT	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

TIM VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
1.	AYAH	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
2.	BUAYAN	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
3.	PURING	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
4.	PETANAHAAN	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
5.	KLIRONG	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
6.	BULUSPESANTREN	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
7.	AMBAL	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
8.	MIRIT	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
9.	BONOROWO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
10.	PREMBUN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
11.	PADURESO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
12.	KUTOWINANGUN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
13.	ALIAN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
14.	PONCOWARNO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
15.	KEBUMEN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
16.	PEJAGOAN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
17.	SRUWENG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
18.	ADIMULYO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
19.	KUWARASAN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
20.	ROWOKELE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN,	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
		EVALUASI, DATA DAN INFORMASI		MASYARAKAT	
21.	SEMPOR	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
22.	GOMBONG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
23.	KARANGANYAR	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
24.	KARANGGAYAM	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
25.	SADANG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE
26.	KARANGSAMBUNG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah.

Rencana kerja perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memuat pendahuluan, visi dan misi, kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta program dan kegiatan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023 telah dibahas pada Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 21 Februari 2023 dan Forum Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang masing-masing diikuti oleh para delegasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta instansi terkait lainnya.

Sangat disadari bahwa Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena tidak semua aspirasi/usulan yang tidak dapat terakomodir dalam rencana kerja ini, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja di masa mendatang sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kebumen, 7 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN



ANDRI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19740529 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
C. Capaian Keuangan.....	39
D. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	45
E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	47
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	62
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	62
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	63
C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	68
A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten	68
B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	69
BAB V PENUTUP.....	70
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kebumen ...	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.....	38
Tabel 2.3 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022	39
Tabel 2.4 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.....	40
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kab. Kebumen..	49
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kebumen.....	61
Tabel 3.1 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BPKPD Tahun 2021-2026	64
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selanjutnya disingkat Renja BPKPD tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja BPKPD tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah BPKPD;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2024 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPKPD Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi BPKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator tujuan yaitu Nilai SAKIP 71.00 pada tahun 2024 dan predikat WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2024 serta dengan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan target Indikator Sasaran yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebesar 15,40% sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) BPKPD tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi penunjang keuangan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPKPD tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 129).

C. Maksud dan Tujuan

Renja BPKPD tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari Renja BPKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BPKPD tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Renja BPKPD tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU OPD).

C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan tentang isu-isu baik eksternal maupun internal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Sub-bab ini memuat uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub-bab ini memuat tentang usulan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKPD.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD dan RPJMD Kabupaten Kebumen.

C. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2024 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali kedelapan dan 6 tahun berturut-berturut Kabupaten Kebumen meraih Opini WTP, setelah sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Dengan penilaian Opini WTP ini maka target IKU Kabupaten Kebumen berdasarkan RPJMD atau RKPD Tahun 2023 telah tercapai.

Untuk mempertahankan capaian tersebut sampai dengan akhir target RPJMD, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen semua Aparat Sipil Negara dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

- c. Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- d. Tertib penyampaian laporan keuangan.
- e. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan, dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Selain itu, target capaian pendapatan asli daerah di Kabupaten Kebumen pada setiap tahunnya senantiasa tercapai, dimana pada tahun 2022 lalu capaian realisasi PAD mencapai Rp 512.346.375.475 dari target sebesar Rp 440.433.051.000 atau 116,33% dari target, capain tersebut meningkat sebesar Rp 40.329.288.360,- atau tumbuh sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022 dan target tahun 2024.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah Rp 667.924.681.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp 28.141.917.500,00, belanja modal sejumlah Rp 4.181.450.000,00, belanja tidak terduga Rp 2.800.000.000,00 dan Belanja transfer Rp 632.801.313.000,00 untuk melaksanakan 3 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan (anggaran setelah perubahan).

Realisasi total anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2021 adalah Rp 665.076.954.687,00 atau 99,57% dari total anggaran Rp 667.924.681.000,00. Realisasi anggaran belanja operasi sejumlah Rp 27.442.234.887,00 atau 97,44% dari pagu anggaran, Realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp 28.141.917.500,00 atau 97,44%, realisasi belanja tidak terduga Rp 1.295.204.500 atau 46,26% dan realisasi belanja transfer Rp 632.491.265.300,00 atau 99,57% dari pagu anggaran

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 97,44% dikarenakan realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium tidak dapat terealisasi sesuai dengan rencana disebabkan adanya pegawai yang purna tugas dan meninggal dunia. Belanja modal terealisasi 92,51% yang sisanya merupakan sisa pelaksanaan lelang. Belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar 46,26% hal tersebut dikarenakan sifat dari belanja ini adalah penyediaan sementara itu realisasi belanja transfer 99,95% sudah sangat baik

Secara rinci realisasi anggaran belanja yang realisasinya dibawah 90% antara lain program kegiatan:

A. Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Pagu Anggaran sebesar Rp 160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 142.265.300,00 atau 88,92% dikarenakan bersifat penyediaan untuk biaya kontribusi pendidikan maupun pelatihan ASN.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu anggaran sebesar Rp 306.990.000,00 terealisasi sebesar Rp 249.908.846,00 atau sebesar 81,41% dikarenakan bersifat penyediaan.
- B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :
- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah, Pagu Anggaran sebesar Rp 1.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.166.330.281,00 atau 89,72% dikarenakan sisa lelang pengadaan barang dan jasa hadiah pemacu pelunasan PBB-P2.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD tahun 2022, dan realisasi Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60		12	12	100	12	24	40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak	60		12	12	100	12	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		dan Penggandaan								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan peraturang dan perundang-undangan	15		3	3	100	3	6	40
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	60		12	12	100	12	24	40
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600		120	120	100	120	240	40
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60		12	12	100	12	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah yang Disusun								
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40		8	8	100	8	16	40
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4	4	100	4	8	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah yang Tersusun, Jumlah Rakorpop								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang mendapat gaji dan tunjangan, jumlah ASN yang menerima Tamsil	60		12	12	100	12	24	40
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Bulan Penatausahaan dan	60		12	12	100	12	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	303		257	17	6,61	10	35	13,62
		Pengadaan Mebel	41		1	-	0	10	8	72,73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin lainnya gedung kantor	21		1	4	400	36	40	190,48
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10		2	2	100	0	2	20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintahan DAerah	60		12	12	100	1	24	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	220		28	48	100	48	76	34,55
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Terpelihara	242		48	48	100	48	0	19,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	301		25	25	100	69	94	31,23
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10		2	2	100	2	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	63%					63%	63%	100%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	315		63	63	100	63	126	40
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	11		3	3	100	2	5	45,45
	Penatausahaan Barang Miik Daerah	Jumlah Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan	11		3	3	100	2	5	45,45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Penatausahaan BMD OPD								
	Pengamanan Barang Miik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pengamanannya (sertifikat,plang, asuransi)	580	-	156	156	100	156	312	53,79
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	25		5	5	100	5	10	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	10		2	2	100	2	4	40
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	10	0	2	2	100	2	4	40
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	5		1	1	100	1	3	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Harga Satuan	4		0	0	0	1	1	25
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Realisasi Belanja	100		100	100	100	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen penganggaran dan regulasi	25		5	5	100	5	10	40
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	20		4	4	100	4	8	20
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Jumlah Dokumen	10		2	2	100	2	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Raperda dan Raperbup APBD								
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanda dan Perbup SHSD/ Standar Satuan Harga	10		2	2	100	2	4	40
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25	25	5	5	100	5	25	20
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan	10		2	2	100	2	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD								
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	20		4	4	100	4	8	40
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan daerah	50		10	10	100	10	20	40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah OPD yang	45		9	9	100	9	18	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	mengajukan pencairan pembiayaan / Belanja transfer								
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji	220	0	52	52	100	52	104	47,27
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	10	0	2	2	100	2	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah dan terlaksananya rakor/pembinaan akuntansi keuangan Daerah	6785		1357	1357	100	1357	2714	40
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional OPD jumlah SP2B BLUD, SP2B BOS yang	6775		1355	1355	100	1355	2710	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		disahkan dan jumlah laporan realisasi APBD Semester I								
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaann rekon dalm rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15	0	3	3	100	3	6	40
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw	10		2	2	100	2	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	aban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Bimtek Akuntansi	5		1	1	100	1	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	5		1	1	100	1	2	40
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah paket kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	10	0	2	2	100	2	4	40
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ	2245	0	449	449	100	449	898	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah penyediaan belanja tidak terduga	5	0	1	1	100	1	2	40
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa yang mendapatkan alokasi bagi hasil retribusi daerah (BHRD)	2245		449	449	100	449	898	40
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%		100%	102,59%	102,59	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	11	11	11	11	100	11	11	100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya Jumlah Unit Kerja yang termonitoe dan	460 Desa 47 OPD 37 Unit		460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100%	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya								
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi keberatan	26 Kec		26 Kec	26 Kec	100	26 Kec	26 Kec	100
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah basis data objek pajak daerah	1.365.632		1.359.505	1.359.505	100%	1.361.544	1.361.544	100
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OPD Pengelola Pendapatan	80		80	80	100%	80	80	100%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan	1.362.938		1.354.791	1.354.791	100%	1.356.823	1.356.823	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Wajib Pajak daerah								
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih	1.362.938		1.354.791	1.354.791	100%	1.356.823	1.356.823	100%

E. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang keuangan.

Dalam melaksanakan fungsinya, badan mengacu pada visi Kabupaten Kebumen yaitu Menuju Kabupaten Kebumen yang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang baik dan benar.

BPKPD Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Badan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian kinerja pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang keuangan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2			Nilai SAKIP	64	67	69	71	64	67	69	71	
3			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,88%	14,48%	15,13%	15,40%	13,25%	14,48%	15,13%	15,40%	

F. Capaian Keuangan

Realisasi total belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 665.076.954.687,00 atau 99,57% dari total anggaran Rp 667.924.681.000,00. Realisasi belanja operasi sebesar Rp 27.422.234.887,00 atau 97,44% dari jumlah anggaran belanja operasi Rp 28.141.917.500,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp 3.868.250.000,00 atau 92,51% dari jumlah anggaran belanja modal Rp 4.181.450.500,00. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 1.295.204.500,00 atau 46,26% dari jumlah anggaran belanja tidak terduga Rp 2.800.000.000,00. Realisasi belanja transfer sebesar Rp 632.491.265.300,00 atau 99,57% dari jumlah anggaran belanja transfer sebesar Rp 632.801.313.000,00. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	BELANJA OPERASI	28.141.917.500	27.422.234.887	97,44
	Belanja Pegawai	15.388.678.000	15.031.633.819	97,68
	Belanja Barang dan Jasa	12.753.239.500	12.390.601.068	97,16
	Belanja Subsidi	-	-	-
2.	BELANJA MODAL	4.181.450.500	3.868.250.000	92,51
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.800.000.000	1.295.204.500	46,26
4.	BELANJA TRANSFER	632.801.313.000	632.491.265.300	99,95
	Belanja Bagi Hasil	12.420.118.000	12.402.615.800	98,86
	Belanja Bantuan Keuangan	620.381.195.000	620.008.649.500	99,95
	JUMLAH	667.924.681.000	665.076.954.687	99,57

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 97,44% karena belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium, terealisasi tidak sesuai yang dianggarkan disebabkan karena terdapat pegawai yang mengalami mutasi, purna tugas dan meninggal dunia selain itu juga terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal terealisasi 92,51% dan sisanya merupakan sisa tender. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 46,26% karena bersifat penyediaan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 99,95%.

Secara rinci realisasi anggaran belanja langsung yang realisasinya dibawah 90% antara lain program kegiatan:

A. Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Pagu Anggaran sebesar Rp

160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 142.265.300,00 atau 88,92% dikarenakan bersifat penyediaan untuk biaya kontribusi pendidikan maupun pelatihan ASN.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu anggaran sebesar Rp 306.990.000,00 terealisasi sebesar Rp 249.908.846,00 atau sebesar 81,41% dikarenakan bersifat penyediaan.

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah, Pagu Anggaran sebesar Rp 1.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.166.330.281,00 atau 89,72% dikarenakan sisa lelang pengadaan barang dan jasa hadiah pemacu pelunasan PBB-P2.

Realisasi anggaran dan belanja dari 3 program, 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan sebagaimana pada tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4
Capaian Anggaran Pendukung Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
1.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	14,48	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.291.007.000	1.260.928.811	97,67
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	191.300.000	186.811.218	97,65
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	369.268.000	358.571.750	97,10
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	351.089.000	343.857.850	97,94
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	283.000.000	278.685.506	98,48

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	96.350.000	93.002.487	96,53
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	836.569.000	814.471.742	97,36
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	347.237.000	343.786.152	99,01
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	182.803.000	172.545.310	94,39
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	121.740.000	118.054.380	96,97
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	184.789.000	180.085.900	97,45
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	701.050.000	678.809.976	96,83
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	129.050.000	126.397.700	97,94
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.000.000	96.438.915	96,44

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	180.000.000	174.016.800	96,68
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100.000.000	95.294.500	95,29
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	192.000.000	186.662.061	97,22
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	165.000.000	160.529.182	97,29
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	620.346.195.000	620.254.348.682	99,99
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.800.000.000	1.295.294.500	46,26
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12.420.118.000	12.402.615.800	99,86
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.727.363.000	1.684.858.559	97,54
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	225.000.000	220.881.600	98,17
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	175.000.000	170.630.932	97,50
						Pengamanan Barang Milik Daerah	752.363.000	749.796.281	99,66
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000	98.684.200	98,68
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	200.000.000	192.916.696	96,46

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	125.000.000	114.805.000	91,84
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150.000.000	137.143.850	91,43
3.	Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.000.000	482.893.490	97,55
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	425.000.000	413.476.090	97,29
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.417.400	99,17
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.555.862.000	15.224.307.135	97,87
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.145.862.000	14.823.544.819	97,87
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410.000.000	400.762.316	97,75
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	142.265.300	88,92
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000	142.265.300	88,92
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	610.000.000	588.671.645	96,50
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.949.000	99,75
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	152.769.200	95,48
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	54.171.760	90,29
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	13.593.000	90,62
						Penyediaan Bahan/Material	120.000.000	117.753.500	98,13
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	195.778.585	97,89
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.000.000	34.656.600	99,02
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.187.600.000	3.874.399.000	92,52

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.127.600.000	3.814.809.000	92,42
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.590.000	99,18
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.490.000	389.054.971	87,14
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.734.525	96,21
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.990.000	249.908.846	81,41
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.500.000	132.411.600	99,93
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.896.000	554.436.339	98,5
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.396.000	293.098.339	98,55
						Pemeliharaan Mebel	7.000.000	7.000.000	100,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.000.000	63.515.500	99,24
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.500.000	190.822.500	98,11
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.584.531.000	5.434.858.737	97,32
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.300.000.000	1.166.330.281	89,72
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	349.531.000	347.778.150	99,50
						Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	270.000.000	266.076.718	98,55
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	125.000.000	124.369.852	99,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	430.000.000	422.348.304	98,22
						Penagihan Pajak Daerah	3.110.000.000	3.107.955.432	99,93
JUMLAH							667.924.681.000	665.076.954.687	99,57

G. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen pada umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut meliputi :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan dan yang menangani pengelolaan keuangan cukup memadai;
- b. Koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan;
- c. Adanya komitmen pengelola keuangan sehingga realisasi keuangan kegiatan dapat mencapai target yang telah direncanakan.
- d. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- g. Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan, melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset:
 - 1) Mengadakan pelatihan/Bimtek mengenai pengelola keuangan pada SKPD
 - 2) Menyenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Menyenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

- 4) Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
 - 5) Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- h. Tertib penyampaian Laporan Keuangan
 - i. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - j. Menerapkan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT) secara bertahap mulai tahun 2018.
 - k. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan FMIS, SIMDA BMD, Sidat Kedaton, SimGaji, SIPPAS, SIPATMA SP2D Online, Simbankeu dan SIBUBA.
 - l. Pilot project bagi OPD yang sudah dianggap mampu melakukan verifikasi SPJ secara mandiri dengan mengoptimalkan fungsi PPK SKPD guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
 - m. Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat.
 - n. Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - o. Pelayanan Pajak Daerah berbasis IT melalui E-Tax, E-BPHTB, SIPBB, Sikopat, dan Sidamen.
 - p. Mudahnya membayar pajak daerah kapan saja dan dimana saja melalui beberapa *channel* pembayaran pajak daerah seperti Bank Jateng (Teller, ATM, *I-Banking*), Tokopedia, Gojek, Indomaret, OVO, LinkAja, Shopee Pay, Dana, maupun Kantor Pos.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2024. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dicapai tersebut, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan dalam mencapai RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang masih rendah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah;
2. Indeks Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah, sehingga mempengaruhi beberapa sektor khususnya infrastruktur
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi daerah;

4. Perlu adanya konsistensi menyeluruh tentang pengelolaan aset yang baik dan benar; dan
5. Masih diperlukannya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengaplikasian SIPD-RI yang akan diberlakukan pada tahun anggaran 2024.

H. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
 - c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
 - d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
 - b. peningkatan upaya pencegahan stunting;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
 - d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:

- a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 - b. peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi, pasokan dan ketersediaan barang;
 - e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja; f. penguatan ketahanan pangan; dan
 - f. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim, dilakukan melalui upaya:
- a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
 - b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
 - c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
 - d. peningkatan kelayakan hunian;
 - e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
 - f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana, dilakukan melalui upaya:
- a. peningkatan kewaspadaan dini;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

Adapun review Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp000)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.464.613,75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24.955.152,1	
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	111.801,75	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	115.873,53	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun , jumlah orang THL yang terbayar	8 Dokumen	77.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun , jumlah orang THL yang terbayar	8 Dokumen	81.071,78	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokuemn	34.801,75	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokuemn	34.801,75	

II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	15.990.312	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	15.998.455,56	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	90 Orang	15.775.812	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	90 Orang	15.775.812	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	214.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	222.643,56	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	1 Paket	115.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	1 Paket	115.000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	BPKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Workshop/Seminar	140 Orang	115.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Workshop/Seminar	140 Orang	115.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	363.500	Administrasi Umum Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	363.500	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.000	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Paket	100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Paket	100.000	

8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	38.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	38.000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	3.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	3.500	
10	Penyediaan bahan/material	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material	1 Paket	70.000	Penyediaan bahan/material	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material	1 Paket	70.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	138.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	138.000	
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	21 Unit	2.953.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	21 Unit	7.328.000	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15 Unit	2.885.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15 Unit	7.260.000	
14	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Unit Mebel	6 Unit	8.000	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Unit Mebel	6 Unit	8.000	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	60.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	60.000	

VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	544.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	562.323,01	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	280.000	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	260.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	278.323,01	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118 Unit	387.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118 Unit	387.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	48 Unit	237.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	48 Unit	237.000	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	50 Unit	70.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	50 Unit	70.000	

21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	80.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	80.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	634.706.944	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	680.002.731,12	
IX	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	10 Dokumen	1.054.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	10 Dokumen	1.056.035,89	
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	4 Dokumen	170.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	4 Dokumen	170.000	
23	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	2 Dokumen	374.000	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	2 Dokumen	376.035,89	
24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanda	2 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	1 Dokumen	300.000	
25	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	150.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	150.000	
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen	60.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	60.000	

	Perubahan Penjabaran APBD		Perubahan Penjabaran APBD								
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	4 Kegiatan	618.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	4 Kegiatan	622.071,78	
27	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah	10 Dokumen	190.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah ah	10 Dokumen	192.035,89	
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer	52 Laporan	118.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer	52 Laporan	118.000	
29	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait		Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji	52 Dokumen	110.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	BPKPD	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji	52 Dokumen	112.035,89	
30	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	BPKPD	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis	2 Dokumen	200.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	BPKPD	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	2 Dokumen	200.000	

	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Administrasi Keuangan			Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)					
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	1357 Dokumen	528.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	1357 Dokumen	532.071,78	
31	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semesteran	1355 Laporan	105.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semesteran	1355 Laporan	105.000	
32	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah pelaksanaan rekon dalm rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	105.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah pelaksanaan rekon dalm rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	107.035,89	
33	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	BPKPD	Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan	2 Dokumen	134.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	BPKPD	Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawab	2 Dokumen	136.035,89	

	Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten			dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		an Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten			
34	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Kegiatan Bimtek Akuntansi	53 Orang	160.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Kegiatan Bimtek Akuntansi	53 Orang	160.000	
36	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	37 Lembaga	24.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	37 Lembaga	24.000	
XII	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Kegiatan	632.506.944	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Kegiatan	677.792.551,67	
37	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Bantuan Desa Tematik Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah	449 Laporan	614.537.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Bantuan Desa Tematik Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang	26 Kecamatan 449 Desa 449 Laporan 0	659.822.607,67	

			desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ, dan Pilkades - Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ, dan Pilkades -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
38	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	1 Laporan	2.000.000		BPKPD	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	1 Laporan	2.000.000	
39	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	449 Laporan	15.969.944		BPKPD	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	449 Desa	15.969.944	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	63%	1.335.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	63%	1.266.287,12	
XII I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	63 Dokumen	1.335.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 Dokumen	1.266.287,12	

40	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga	1 Dokumen	85.000	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga	1 Dokumen	85.000	
41	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	110.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	116.107,67	
42	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan	2 Laporan	120.000	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan	2 Kegiatan	120.000	
43	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah unit barang milik daerah yang difasilitasi pengamannya (sertifikat, plang, asuransi)	1 Laporan	510.000	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah unit barang milik daerah yang difasilitasi pengamannya (sertifikat, plang, asuransi)	156 unit	510.000	
44	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah jenis dokumen Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	150.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah jenis dokumen Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 jenis	160.179,45	

45	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	2 Laporan	110.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	2 kegiatan	110.000	
46	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	2 Laporan	165.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	2 dokumen	165.000	
47	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD	40 Orang	85.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD	1 kegiatan	85.000	
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	5.259.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	5.295.646,02	
XI V	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	10 Pajak Daerah	5.259.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	11 Pajak Daerah	5.295.646,02	
48	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya	2 Dokumen	1.108.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya	460 Desa 78 Unit Kerja	1.110.035,89	
49	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi dan keberatan	26 Laporan	162.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi dan keberatan	26 Lokasi	162.000	

I. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada BPKPD Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Rincian usulan kegiatan yang masuk dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/Kegiatan Penunjang Urusan/Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	324 Lokasi	Jumlah Desa yang mendapat bantuan keuangan desa	324 Lokasi	Rp 37.524.200.000 (PAD/DAU)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan Sumber Daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah. Undang – Undang didesain untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa kebijakan dan pengaturan.

Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU

HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-*direct* pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan agar seluruh APBD dapat dilaksanakan menuju arah yang sama dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian harapannya semua warga negara dapat merasakan dan menikmati layanan publik yang berkualitas di seluruh wilayah republik Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 adalah “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Prioritas pembangunan tahun 2024 antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
 - c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
 - d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
 - b. peningkatan upaya pencegahan stunting;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
 - d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 - b. peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi, pasokan dan ketersediaan barang;
 - e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja; f. penguatan ketahanan pangan; dan
 - f. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
 - b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
 - c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
 - d. peningkatan kelayakan hunian;
 - e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
 - f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan kewaspadaan dini;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

BPKPD Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan sehingga program kegiatan di BPKPD mendukung Misi 1 Bupati Kebumen Tahun 2021 - 2026 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Dengan jalan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan BPKPD, tujuan dan sasaran rencana kerja BPKPD tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BPKPD Tahun 2021-2026

No	Bidang/Urusan /Indikator	Satuan	Data Awal		Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Urusan Keuangan Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabek a. Nilai SAKIP b. Opini BPK (WTP/WDP)	Nilai WTP/WDP	63,85 WTP	64,00 WTP	67,00 WTP	69,00 WTP	71,00 WTP	74,00 WTP	77,00 WTP
	Sasaran :	Persentase PAD	14,59	12,88	14,88	15,13	15,40	15,74	15,63

	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Terhadap Pendapatan Daerah							
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Rencana kerja BPKPD Tahun 2023 mencakup 4 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang terkait program, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
- 5) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah
 - 1) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penyusunan Standar Harga
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 6) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 7) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 8) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 4) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 5) Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 6) Penagihan Pajak Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas Pendanaan di BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 memperhatikan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 diantaranya adalah :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 680.002.731.120
	• Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.056.035.890
	• Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 622.071.780
	• Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 532.071.780
	• Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 677.792.551.670
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.266.287.120
	• Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.266.287.120
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 5.295.646.020
	• Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 5.295.646.020
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 24.955.152.100
	• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 115.873.530
	• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 15.998.455.560
	• Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 85.000.000
	• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 115.000.000
		Rp 363.500.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<p>Rp 7.328.000.000</p> <p>Rp 562.323.010</p> <p>Rp 387.000.000</p>
Jumlah		Rp 711.519.816.360

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat dalam lampiran Renja ini.

BAB V PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga *cost*-nya.

Rencana Kerja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari BPKPD, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPKPD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKPD tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kebumen tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati BPKPD Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder BPKPD Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 7 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAFTARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740529 199303 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Heri Purnomo	
Hantari Mattademi	

LAMPIRAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02						661,765,557,750						711,519,816,360		
5	02	01											100 %	24,955,152,100	
5	02	01	2.01										8 Dokumen	115,873,530	
5	02	01	2.01	01									8 Dokumen 8 Dokumen	81,071,780	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	07									8 Dokumen 4 Laporan	34,801,750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02										12 Bulan	15,998,455,560	
5	02	01	2.02	01									12 Bulan 90 Orang/ bulan	15,775,812,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	03									12 Dokumen 12 Bulan	222,643,560	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05										1 Paket	115,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK/Workshop/Seminar				140 Orang	115,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	140 Orang	115,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	363,500,000					12 Bulan	363,500,000	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 1 Paket	12,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 1 Paket	12,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan 12 Paket	100,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 12 Paket	100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 12 Paket	38,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 12 Paket	38,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan 1 Dokumen	3,500,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 1 Dokumen	3,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan bahan / material -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan 1 Paket	70,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 1 Paket	70,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				12 Bulan 12 Laporan	138,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 12 Laporan	138,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip -Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan 1 Dokumen	2,000,000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 1 Dokumen	2,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	10 Unit	2,953,000,000						10 Unit	7,328,000,000	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21 Unit 15 Unit	2,885,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	21 Unit 15 Unit	7,260,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Mebel				21 Unit 6 Unit	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	21 Unit 6 Unit	8,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit 6 Unit	60,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	21 Unit 6 Unit	60,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya														
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	544,000,000						12 Bulan	562,323,010	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 12 Laporan	4,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 12 Laporan	4,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sunver daya air dan Listrik -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 12 Laporan	280,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 12 Laporan	280,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan 12 Laporan	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	12 Bulan 12 Laporan	278,323,010	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	118 Unit	387,000,000						118 Unit	387,000,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118 Unit 48 Unit	237,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	118 Unit 48 Unit	237,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Mebel														
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara				118 Unit 50 Unit	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	118 Unit 50 Unit	70,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara				118 Unit 2 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	118 Unit 2 Unit	80,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	634,706,944,000						100 %	680,002,731,120	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	1,054,000,000						10 Dokumen	1,056,035,890	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan -Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				10 Dokumen 4 Dokumen	170,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen 4 Dokumen	170,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD Tersusun -Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				10 Dokumen 2 Dokumen	374,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen 2 Dokumen	376,035,890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Perubahan -Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				10 Dokumen 2 Dokumen	300,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen 2 Dokumen	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanja -Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				10 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen 4 Kegiatan	60,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen 4 Kegiatan	60,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	618,000,000						4 Kegiatan	622.071.780	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah				4 Kegiatan 10 Dokumen	190,000,000	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan 10 Dokumen	192.035.890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer				4 Kegiatan 52 Laporan	118,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan 52 Laporan	118.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji				4 Kegiatan 52 Laporan	110,000,000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan 52 Laporan	112.035.890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan -Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Kegiatan 2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan 2 Dokumen	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	1357 Dokumen	528,000,000						1357 Dokumen	532.071.780	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semester I -Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1357 Dokumen 1355 Laporan	105,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	1357 Dokumen 1355 Laporan	105.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Pelaksanaan Rekon Dalam Rangka Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, denagn Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				1357 Dokumen 3 Laporan	105,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	1357 Dokumen 3 Laporan	107.035.890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Pelaporan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen -Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1357 Dokumen 2 Dokumen	134,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	1357 Dokumen 2 Dokumen	136.035.890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan BIMTEK Akuntansi -Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				1357 Dokumen 53 Orang	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	1357 Dokumen 53 Orang	160.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD				1357 Dokumen 37 Lembaga	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	1357 Dokumen 37 Lembaga	24.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	632,506,944,000						2 Kegiatan	677.792.551.670	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.04	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah														
5 02 02 2.04	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bantuan Desa Tematik Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD), BKK,TPQ, dan Pilkades -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Kegiatan 449 Laporan	614,537,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan 449 Laporan	659.822.607.670	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah penyediaan Belanja Tidak Terduga				2 Kegiatan 1 Laporan	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan 1 Laporan	2,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) -Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Pihak Ketiga (KPIPW dan Perhutani) yang mendapatkan Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah				2 Kegiatan 449 Laporan	15,969,944,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan 449 Laporan	15.969.944.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	63 %	1,335,000,000					63 %	1.266.287.120		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	63 Dokumen	1,335,000,000					63 Dokumen	1.266.287.120		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga -Jumlah Standar Harga yang Disusun				63 Dokumen 1 Dokumen	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	1 Dokumen 1 Dokumen	85.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD -Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				63 Dokumen 2 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	63 Dokumen 2 Dokumen	116.107.670	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan pendampingan pentausahaan				63 Dokumen 2 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	63 Dokumen 2 Dokumen	120.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang difasilitasi pengamanannya (Sertifikat plang asuransj)				63 Dokumen 1 Laporan	510,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	63 Dokumen 1 Dokumen	510.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah				63 Dokumen 5 Dokumen	150,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	63 Dokumen 5 Dokumen	160.179.450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi laporan BMD				63 Dokumen 2 Laporan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	63 Dokumen 2 Dokumen	110.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang disusun -Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				63 Dokumen 2 Laporan	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	2 Dokumen 2 Laporan	165.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD				63 Dokumen 40 Orang	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	63 Dokumen 40 Orang	85.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%		%	100 %	5,259,000,000						100 %	5.295.646.020	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah		Pajak Daerah	10 Pajak Daerah	5,259,000,000						10 Pajak Daerah	5.295.646.020	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah -Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya				10 Pajak Daerah 2 Dokumen	1,108,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Pajak Daerah 2 Dokumen	1.110.035.890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi dan keberatan				10 Pajak Daerah 26 Laporan	162,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Pajak Daerah 26 Laporan	162.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah basis data objek pajak daerah -Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Pajak Daerah 1.361.544 Laporan	274,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Pajak Daerah 1.361.544 Laporan	288.251.230	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah OPD pengelola pendapatan				10 Pajak Daerah 80 Laporan	141,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Pajak Daerah 80 Laporan	141.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah penetapan wajib pajak daerah				10 Pajak Daerah 1.361.544 Dokumen	455,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Pajak Daerah 1.361.544 Dokumen	461.107.670	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	-Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang tertagih				10 Pajak Daerah 1.361.544 Dokumen	3,119,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan profesionalisme aparatur	BPKPD Kabupaten Kebumen	10 Pajak Daerah 1.361.544 Dokumen	3.133.251.230	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL							661,765,557,750							711.519.816.360	

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah BPKPD sebagaimana terlampir.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Aula Lantai 2 BPKPD Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 23 Februari 2023

Pimpinan Sidang
KEPALA BPKPD KABUPATEN KEBUMEN



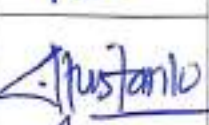



Dis. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.


Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Restu Gunawan, S.H.	DPRD	Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen	
2.	Heri Purnomo, S.STP., M.Eng.	Unsur Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.	Dr. Harini Abrilla Setyawati, S.E., M.Si.	Unsur Lembaga	Universitas Putra Bangsa	
4.	Aristanto	Unsur Desa	Desa Kawedusan	
5.	Susilo Adi N	Unsur Wajib Pajak	Trio Azana Style Hotel	

DELEGASI OPD BPKPD PADA FORUM PERANGKAT DAERAH BPKPD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Aristanto	Delegasi BPKPD Kabupaten Kebumen	Desa Kawedusan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 2 Telp. (0287) 381051 Fax. (0287) 384546
KEBUMEN

NOTULEN

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2022
Kepada : Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen
Melalui : Sekretaris BPKPD Kabupaten Kebumen
Dari : Subkoordinator Perencanaan
Perihal : Forum Perangkat Daerah BPKPD Kab.Kebumen

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, hasil mengikuti Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen:

A. Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Tempat : Aula BPKPD Kab.Kebumen
Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d Selesai
Acara : Forum Perangkat Daerah BPKPD
Kab.Kebumen

Peserta Forum PERANGKAT DAERAH BPKPD Kab.Kebumen:

1. Inspektorat Kabupaten Kebumen
2. BAPPEDA Kabupaten Kebumen
3. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen
4. Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
5. Perwakilan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen
6. Perwakilan Camat di Kabupaten Kebumen
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen
9. Perwakilan Kades di Kabupaten Kebumen
10. Perwakilan Wajib Pajak Daerah
11. Perwakilan Perguruan Tinggi
12. Perwakilan LSM

B. Pembahasan :

- Forum Perangkat Daerah dengan susunan acara Registrasi Peserta, Pembukaan, Pembacaan Doa, Laporan Penyelenggara, Pleno oleh Moderator, Pembacaan dan Penyepakatan Tata Tertib, Paparan Prioritas Pembangunan Daerah 2023 dan Paparan Rancangan Renja Perangkat Daerah BPKPD 2024, Diskusi dan tanya jawab, Pemilihan Delegasi, Penandatanganan BA Forum Perangkat Daerah BPKPD Kab.Kebumen, dan Penutupan.

Acara diawali dengan laporan panitia yang melaporkan bahwa acara terselenggara berkat kerjasama yang baik seluruh karyawan/ti BPKPD Kabupaten Kebumen dan berharap acara forum Perangkat Daerah berjalan lancar dan sukses bermanfaat.

- Dasar dari Forum PERANGKAT DAERAH ini adalah
 - Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 800/0255 Tanggal 25 Januari 2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Forum PD Tahun 2023 dan Pagu Indikatif PD Tahun 2024.
 - DPA Tahun Anggaran 2023.
- Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Forum PD :
 - a. Memperoleh masukan untuk penajaman target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah;
 - c. Penajaman indikator serta target program, kegiatan dan subkegiatan; dan
 - d. Menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang akan dimuat pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Arah dari BAPPEDA untuk tema pembangunan pada tahun 2024 adalah Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia"
- Pembacaan doa oleh saudara Chairul Affandi
- Laporan Penyelenggaran Sekretaris BPKPD Ida Indrayani Achmal, A.P.,M.T

No	Nama/Instansi	Tanggapan
1.	Restu Gunawan, S.H (Ketua Komisi C DPRD)	Para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan untuk dapat berinovasi terkait dengan masalah digitalisasi. Bagi OPD yang sudah menjalankan diharapkan untuk mengoptimalkan dalam hal pengawasannya. Terkadang sudah disediakan alatnya namun tidak diaktifkan. Harapannya penggunaan dapat dimaksimalkan pendapatan dapat tercapai. Pajak Bumi Bangunan (PBB) saat ini masih banyak yang manual, namun program terobosan yang dilakukan seperti program Satu Hari Lunas (SHL) yang disertai dengan pemberian hadiah cukup luar biasa dan mampu menarik antusias masyarakat. Berikutnya mungkin dapat dibuat

		<p>program serupa pada pajak atau pungutan yang lain.</p> <p>Pada tahun 2024 diharapkan seluruh aset pemerintah sudah tersertifikasi. Selain itu, aset-aset yang saat ini dimanfaatkan sebagai obyek wisata perlu dilakukan penertiban sehingga dapat menambah pendapatan.</p>
2.	(Heri Purnomo, S.STP.,M.Eng) BAPPEDA	<p>Terkait dengan perencanaan, pada tahun 2023 akan dilaksanakan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tengah periode sehingga perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah.</p> <p>Capaian indikator kinerja utamanya kemandirian fiskal 2021-2026 sudah tercapai di tahun 2022. Terdapat 2 (dua) kemungkinan. Pertama jika dilihat dari tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, namun dari sisi pendapatan transfer daerah kenaikannya cenderung tidak seoptimis saat penyusunan RPJMD sehingga dari sisi total pendapatan proyeksinya meleset lebih rendah dari yang direncanakan.</p> <p>Terkait isu strategis daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah, dari sisi makro pada tahun 2024 terdapat beban anggaran yang cukup besar yaitu tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024.</p> <p>Terkait dengan adanya kemampuan fiskal yang perkembangannya tidak terlalu signifikan, maka perlu diupayakan adanya efisiensi belanja mengingat belanja APBD saat ini ketentuannya semakin rinci. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU) <i>Earmark</i> yang sejak awal telah diupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penempatan-penempatan anggaran yang telah disusun sebisa mungkin sudah mencukupi alokasi belanja DAU <i>Earmark</i>.</p>
3.	(Agus Rianto, S.E.,M.Si) INSPEKTORAT	<p>Berkaitan dengan <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP), terdapat wilayah-wilayah yang dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap sebagai titik rawan korupsi. Poin pertama di perencanaan dan penganggaran yang terdapat di Komisi C DPRD dan BPKPD.</p> <p>Berikutnya mengenai zona integritas, tahun depan untuk melakukan tanda tangan kembali sehingga integritas anti korupsi dapat dipertanggungjawabkan.</p>

DISKUSI

TERMIN I

No	Nama/Instansi	Permasalahan	Nama/Instansi	Tanggapan
1.	Aditya (Forum Anak Indonesia)	Apakah di Kebumen ditetapkan pajak minuman beralkohol? Banyak alkohol yang beredar, apakah peredarannya tersebut bersifat illegal? Apakah terdapat anggaran untuk pendidikan? Mengingat masih banyak sekolah-sekolah yang di desa pelosok belum memiliki fasilitas yang memadai? Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, apakah terdapat anggaran terkait masalah tersebut? Apa upaya penanganan yang dilakukan pemerintah?	Kepala Badan BPKPD	Terdapat peraturan daerah mengenai minuman keras, namun tidak ada pengenaan pajak untuk minuman keras. Pemerintah sudah melakukan operasi di sekitar stadion Candradimuka.
			BPKPD	Minuman keras dikenai cukai oleh pemerintah pusat. Tidak masuk dalam pajak yang dipungut oleh kabupaten. Dalam Perda No. 3 Tahun 2010 telah diatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman keras.
			Dinas Sosial	Sudah disediakan anggaran untuk program perlindungan dan kekerasan anak. Dinas sosial juga sudah membuat program terkait masalah tersebut.
2.	(Kepala Desa Kawedusan)	Tarif pajak dinaikkan tetapi tidak disertai dengan pembangunan fasilitas yang memadai. Di Desa Kawedusan terdapat drainase yang berada di bawah kewenangan kabupaten. Sejak tahun 2020, kondisi drainase sudah rusak parah hingga mengakibatkan banjir di sekitarnya. Apakah dana darurat dapat digunakan untuk perbaikan drainase tersebut? Hal ini dikarenakan pengajuan perbaikan sudah diajukan sejak lama namun tidak ada tindak lanjut hingga	Kepala Badan BPKPD	Dana darurat masuk kategori belanja tidak terduga. Belanja tersebut dilakukan manakala terjadi bencana dan bencana tersebut ditetapkan oleh bupati, sehingga dana darurat tidak dapat digunakan untuk perbaikan drainase tersebut. Apabila belum ada tindak lanjut, desa dapat terus mengajukan kepada dinas terkait.
			Ketua Komisi C DPRD	Apabila pengajuan perbaikan

		<p>saat ini, bahkan hingga masyarakat turun tangan memperbaiki sendiri drainase tersebut dengan dana pribadi. Selain itu, pembagian anggaran untuk tiap-tiap OPD tidak dirinci dalam materi.</p>		<p>kepada dinas terkait belum ada tindak lanjut, mungkin dapat dicoba secara politis dengan cara mengajukan melalui wakil yang berada di wilayah Kawedusan. Barangkali dapat dilakukan perbaikan dengan dana aspirasi dari wakil tersebut.</p>
			<p>DPU</p>	<p>Apabila proposal yang diajukan belum ada tindak lanjut, hal ini dikarenakan DPU harus merealisasikannya berdasarkan prioritas. Selain itu, mungkin saran dari Komisi C dapat dilakukan dan permasalahan ini akan disampaikan kepada bidang yang bersangkutan.</p>
<p>3.</p>	<p>Sangadah (Administrasi Pembangunan)</p>	<p>Realisasi fisik tahun 2022 BPKPD tidak tercapai 100% sehingga dapat menjadi catatan evaluasi di tahun depan agar dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Apabila <i>output</i> sudah dapat tercapai sebenarnya sudah dapat dikatakan 100% sehingga mungkin dapat diperbaiki dalam pelaporan keuangan fisiknya yang disampaikan oleh pembangunan. Berikutnya berkaitan dengan materi forum OPD, administrasi pembangunan belum mendapatkan data program dan kegiatan. Biasanya disampaikan dalam bentuk matrik yang di dalamnya terdapat indikator. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan</p>	<p>Kepala Badan BPKPD</p>	<p>Sebenarnya realisasi fisik sudah 100%, hanya saja barangkali terdapat kesalahan dalam proses penginputan yang mengakibatkan hasilnya tidak mencapai 100%.</p>

	dengan wilayah kecamatan dan desa apabila dimungkinkan dapat dimasukkan dalam materi agar dapat dibaca oleh peserta forum yang diundang dari unsur kecamatan dan desa sehingga dapat menjadi informasi dini bagi mereka.		
--	--	--	--

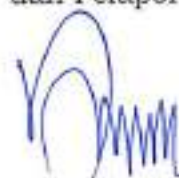
TERMIN II

No	Nama/Instansi	Permasalahan	Nama/Instansi	Tanggapan
1.	Kepala Desa Logede	<p>Capaian PBB saat ini sejauh apa? Barangkali desa dapat membantu dalam memenuhi capaian tersebut. Selain PBB, pajak yang lain seperti retribusi, pajak restoran, dan reklame nilainya masih rendah. Bagaimana upaya yang dilakukan BPKPD untuk menaikkan pendapatan daerah dari sisi tersebut? Standar harga APBDes sulit untuk diterapkan di desa. Selain itu, kepala desa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti tidak adanya SPPD. Ketika ada tugas ke luar, mereka meminta uang SPPD kepada kepala desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk SPPD. Harapannya dalam penentuan standar harga, kepala desa dapat dilibatkan dan waktunya dapat disesuaikan jangan terlalu dekat dengan akhir tahun. Terkait dengan BKK, harapannya dalam penentuan BKK juga menyesuaikan dengan usulan yang diajukan dari desa sehingga akan lebih terarah</p>	Kepala Badan BPKPD	<p>Capaian PBB kabupaten tidak pernah lunas total. Salah satu inovasi upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu salah satunya dengan adanya sistem informasi PBB desa. Standar desa masuk ke dalam ranahnya PMD. Perjalanan dinas juga tidak ada hingga tingkat kabupaten. SPPD baru diberikan apabila dilakukan lebih dari 8 jam. Apabila kurang dari 8 jam, maka hanya diberi uang transport. Terkait BKK, laporan pertanggungjawaban tetap menjadi persyaratan pencairan.</p>

		pembangunannya.		
2.	BPBD	Terkait perencanaan pengalokasian anggaran BTT sebesar 2 miliar, apakah anggaran tersebut memang sudah disediakan atau hanya harapan?	Kepala Badan BPKPD	BTT tersebut adalah penyediaan dan termasuk belanja tidak tetap.

Demikian laporan kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Analisis Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan



DEDY PRAYOGI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

Jl. Pahlawan No. 2 Kebumen, Jl. Indrakila No. 5 Kebumen
Telp. 0287-381051 Fax. 0287-384546
Website: <https://bpkpd.kebumenkab.go.id> Email: bpkpdkbm@gmail.com
Kode Pos 54311

Kebumen, 22 Februari 2023

Nomor : 000/259
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah BPKPD

Kepada
Yth. 1. Asisten Administrasi Umum Sekda
Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
4. Tertampir
di
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 23 Februari 2023

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Aula Badan Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen, Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen

Acara : Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana kerja Perangkat
Daerah Tahun 2024

Keterangan : -

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197405291993031001

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
13.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
17.	Camat Kebumen
18.	Camat Klirong
19.	Camat Prembun
20.	Camat Rowokele
21.	Camat Sadang
22.	Sekretaris BPKPD Kabupaten Kebumen
23.	Para Kepala Bidang di Lingkungan BPKPD Kabupaten Kebumen
24.	Para Kasubbid/Kasubbag di Lingkungan BPKPD Kebumen
25.	Sub Koordinator di Lingkungan BPKPD Kabupaten Kebumen
26.	Kepala Desa Logede Kecamatan Pejagoan
27.	Kepala Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen
28.	Kepala Desa Surotrunan Kecamatan Alian
29.	STIE Putra Bangsa Kebumen
30.	Notaris Evaristus Ratri Kartika, S.H
31.	Ketua LSM Formasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah diunggah ke sistem sarana elektronik yang tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSiE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

32.	Trlo Azana Style Hotel (Wajib Pajak Hotel)
33.	Olive Chicken Kebumen (Wajib Pajak Restoran)
34.	Pizza Hut Kebumen (Wajib Pajak Restoran)
35.	Ketua Forum Anak Indonesia
36.

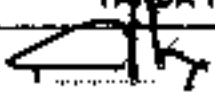
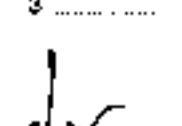

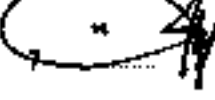












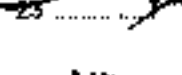







Sesuai dengan ketentuan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Siak
Tahun 2023

Kode	Jenis Kegiatan/Program/Kelembagaan/Instansi	Indikator Program/Kelembagaan/Instansi	Rencana Kerja/Program/Kelembagaan/Instansi	Anggaran Dasar/Kelembagaan/Instansi	Rencana Kerja/Program/Kelembagaan/Instansi	Gedung				Kategori	Rencana Kerja/Program/Kelembagaan/Instansi		Rencana Kerja/Program/Kelembagaan/Instansi
						Dana	Luas	Jumlah	Jumlah		Rencana Kerja/Program/Kelembagaan/Instansi		
											Anggaran	Luas	
6	02	02	02.1	02	Perbaikan Jalan	150/100	150/100	1	150/100	150/100	150/100	150/100	150/100
7	02	02	02.1	02	Perbaikan Jalan	150/100	150/100	1	150/100	150/100	150/100	150/100	150/100
						150/100	150/100	1	150/100	150/100	150/100	150/100	150/100

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Aula BPKPD Kab. Kebumen, Jl Pahlawan No. 02
 Acara : Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	NAMA	INSTANSI	L	P	TANDA TANGAN
1	ANON ANIRAI	BPKPD	L		
2					2
3					3
4	Dedy Anugrah	BPKPD	✓		
5	Ibu Intanayanti	BPKPD		✓	
6	Pleski Gemawati	DKP	✓		
7	Arman Kurniawan	BPKPD	L		
8	Hani Permana	Bappab	✓		
9	Sri Purwati	Ke. Kelong			
10	Hartati	Disdikpora		✓	
11	Bagus Budi W	Ag. Budenominan	✓		
12	Surdono	PICER HUS	✓		
13	Kristiana M.	BPKPD		✓	
14	Misparini H.	Dinasor PRA			
15	Abu Radar	DLHKP			
16	Fathul Muin	Olive			
17	Alur	Olive			
18	Sapri	Olive			
19	Syarif Martini A	Dinas PACEB	L		
20	Agus Fandi	APKPD	L		
21	Harini Alorika S.	UPB	P		
22	Santi W	Dinas PMO		P	
23	Alau Alau	BPKPD	✓		
24	Masruddy	Distapmas		✓	
25	Indah D	Pendes Logistik	L		
26	Fahma Dewi P.	BPKPD Klen		P	
27	Aditya Dohot S	Forum Prok	L		
28	Haris Andi S	BPKPD-	✓		
29	Srus	KAPES	L		
30	Gunind	Kendure	P		

NO	NAMA	INSTANSI	L	P	TANDA TANGAN
31	Hartono	BPKPD		✓	31
32	Wahyu Yulianto	DTU PR	L		32
33	Zuharon	Kec. Kebun	P		33
34	Emi H			P	34
35	M. Ruyani	BPKPD		P	35
36	Klaes	BPKPD	L		36
37	Sepreni	---	L		37
38	Agus Susanto	Suratmawa	L		38
39	Andi H.	BPKPD	L		39
40	Su W	---		✓	40
41	KARTIKA	Notaris	L		41
42	Songadot	Pa AP		P	42
43	Dian N	BPKPD		P	43
44	Susilo Adi N	Trio Anas Hdd	L		44
45	Umi F.	Disperkimub		P	45
46	Kusumawatyas P. W	BPKPD		✓	46
47	Achsa	BPKPD		✓	47
48	Itami S	BPKPD	✓		48
49	Pulek S	BPKPD	✓		49
50	AGUS RIATITO	CTDA	✓		50
51	Dian Anggraeni	BPKPD		✓	51
52	Dwi Y	BPKPD		✓	52
53	Emy H	BPKPD		P	53
54	Kusumanan	Kec. Preme	L		54
55	Andi	Kec. Sebang	✓		55
56	Arni			P	56
57	Indriyati	BPKPD			57
58	SUGANDI	BPKPD		P	58
59	Pranono				59
60	Sunardi	---			60
61	Khoerul Afandi	---			61
62	Ade Wahyu Distaya	---			62
63	Emi Astuti	---		P	63
64	Ary Dwi Octaviananti	BPKPD			64
65	Sukarti	BPKPD			65

Form 8
Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Perangkat Daerah Tujuan	Usulan Kegiatan	Keluaran		Lokasi	Lokasi Detail	APBD Provinsi (Rp)	Keterangan
			Uraian	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			NIHIL					

Kebumen, 23 Februari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Des. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19740529 199303 1 001

Form 9
Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kab/Kota (Daerah)	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usulan Kegiatan	Sasaran		Keukuran		Lokasi	Usulan Anggaran			Rangkang	Keterangan
					Jenis Bangunan	Jenis Sub Bantuan			Uraian	Volume	Uraian	Volume		APBD Provinsi (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
									NIHIL									

Kebumen, 23 Februari 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Drs. ADEK ANDRI SUSILO, M.Si
Peg. Ners Utama Muda
0529 199303 1 001

Form 10
Usulan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Pengusul	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bidang	Sub Bidang	Kementerian	Masa Kewenangan	Jenis Pelaksanaan	Rincian	Detail Rincian	Prioritas	Pengadaan	Satuan	Volume	Unit Cost	Nilai Usulan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

NIHIL



Kebumen, 28 Februari 2023
 Kepala Badan Pengelola Keuangan
 dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
 Drs. ACE ANDRI SUSILO, M.Si
 Pemerta Utama Muda
 NIP. 4740529 199303 1 001

Form 13
Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Validasi terhadap usulan kegiatan DAPAT

No	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume	Lokasi	Validasi	Catatan Validasi Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			NIHIL					

Kebumen, 23 Februari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19740529 199303 1 001

Form 14
Daftar Usulan Kegiatan Lintas OPD / Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Mengu Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					NIHIL									

Kebumen, 23 Februari 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
Pemilihan Utama Muda
NIP. 19740829 199303 1 001